

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminah, Siti dan Muhamad Daerobi, 2019, *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, ILRC, Jakarta, hlm.4-5.
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bawengan, G, 1988, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Eddyono, Sri Wiyanti, dkk, 2019, *Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 No. 22 P/Hum/2018 Atas Hak Uji Materil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*.
- Effendi, Tolib, 2016, *Pokok Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hamzah, Andi, Jur, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Handayani, Febri, 2016, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Kahmedia, Yogyakarta.
- Harap, Yahya, M, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hardijanto, Andik, 1998, *Peran Paralegal Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*, Makalah Dalam Kalabahu Angkatan VII, LBH Semarang, Semarang.
- Hendra winarta, Frans, 2009, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2011, *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Hukum Penasehat Bagi Warga Negara*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI*, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, H. Salim, dkk, 2014, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, dan Erlies Septiani Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Prasada, Jakarta
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- Juwana, Hikmahanto, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta
- Kusumah, Mulyana W, 1991, *Paralegal Dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*, YLBH, Jakarta.
- LBH Jakarta, 2010, *Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta, Kode Etik Dan Standart Operasional Prosedur*, LBH Jakarta, Jakarta
- Margono, Suyud, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Indo Hill Co. Jakarta.
- Marzuki, M. Laica, 2005, *Berjalan di Ranah Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Prenada Mulia, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

- _____, 2019, *Mengenal Hukum*, CV. Cahaya Atma Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, UI-Press, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Oktoberina, Sri Rahayu dan Niken Savitri, 2011, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- OSJI, 2012, *Paralegal Berbasis Masyarakat, Panduan Untuk Praktisi*, Yayasan Tifa, Jakarta.
- Priyanto, Anang, 2012, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ombak, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2011, *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta.
- Ravindran, 1989, *Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal*, YLBHI, Jakarta.
- Saragih, Bintang Regen, 2006, *Politik Hukum*, Utomo, Bandung
- Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cet-1, Visimedia, Jakarta
- Sigalingging, Abdul Aziz dkk, 2015, *Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat, Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas*, LBH Padang, Padang
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Simanjuntak, Ricardo, 2011, *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta
- Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

- _____, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2010, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers*, Jakarta.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Kedelapan, Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, SW, Maria, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang dan Aries Susanto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Tardi, Siti Aminah, dkk, 2019, *Paralegal Bukan Parabegal, Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum*, ILRC, Jakarta.
- Thamrin, M.Irsyad dan M Farid, 2010, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, LBH Yogyakarta, Yogyakarta
- _____, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wantu, M, Fence, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Raviva Cendekia, Yogyakarta.
- Wlas, Lasdin, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah, 2013, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta

Winarta, Hendra, Frans, 2009, *Pro Bono Publica, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

YLBHI, 2006, *Panduan Hukum di Indonesia*, Sentralisme Production, Jakarta Pusat.

YLBHI, 2014, *Panduan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41/KMA/IV/2009 Tentang Tanggapan Mahkamah Agung Atas Fatwah Mahkamah Agung Perihal Beracara LKBH Kampus.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum.

C. Karya Ilmiah

Gede Agung Wirana Nusantara, 2016, “Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali.

Jorawati Simarmata, 2018, “Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial dan Serikat Buruh Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 4 Tahun 2018.

Muhammad Saleh Gasin, 2018, “Eksistensi Pemberi Bantuan Hukum Selain Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia”, *Tesis*, Program Magister Hukum Litigasi Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Nurwita Kusumaningrum, 2017, “Kedudukan Hukum Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 88/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Focus Group Discussion Tentang Kompetensi Paralegal”, <https://www.bphn.Go.Id/News/2018041303002740/FGD-Para-Legal>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020.

Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, “Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Balikpapan”, [https://balikpapankota.bps.go.id./](https://balikpapankota.bps.go.id/), diakses pada tanggal 26 Maret 2020.